BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan ditujukan untuk memberikan informasi kepada penggunanya terutama para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Manajemen perusahaan memiliki akses terhadap informasi keuangan perusahaan, mereka melaporkan kinerja keuangan kepada *stakeholders* mengenai pertumbuhan dan keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh sebab itu, laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan harus memiliki kualitas yang baik. Untuk mengukur kualitas sebuah laporan keuangan bukanlah suatu hal yang mudah, sehingga para pemakai informasi laporan keuangan membutuhkan jasa pihak ketiga untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Sibuea & Arfianti, 2021)

Upaya agar resiko tersebut dapat diminimalisir salah satunya dengan melakukan audit eksternal. Auditor sebagai pihak ketiga dianggap mampu menjembatani keduabelah pihak dengan melakukan audit secara profesional dan independen. Aturan pada Pasal 68 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang tercantum pada nomor (1) yang menjelaskan bahwa laporan keuangan wajib diserahkan oleh direksi kepada akuntan publik untuk diaudit. Pelanggaran yang menjadi masalah utama pada penelitian akuntansi adalah sejauh mana manajer melakukan tindakan manipulasi laba yang dilaporkan untuk menguntungkan kepentingan sendiri. Tindakan manipulasi laba ini dapat menyebabkan kualitas laporan keuangan menurun. Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menetapkan standar audit ketika auditor menjalankan tugasnya. Standar audit terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor infrastruktur di Indonesia tidak luput dari praktik-praktik manipulasi laporan keuangan dan dugaan korupsi yang berdampak negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah yang melibatkan PT Adhi Karya Tbk, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi dan pengembangan infrastruktur. Kasus ini terjadi melalui anak perusahaannya, yakni PT Adhi Persada Realti (APR), yang terungkap pada tahun 2021 (Medistiara, 2022)

Kasus tersebut bermula dari proses akuisisi lahan yang dilakukan oleh PT APR di kawasan Limo, Kota Depok. Berdasarkan temuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, PT APR melakukan pembelian lahan dengan nilai mencapai Rp60,2 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi sejumlah penyimpangan yang signifikan. Dari total luas lahan yang seharusnya mencapai sekitar 20 hektare, hanya sekitar 1,2 hektare lahan yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Selain itu, lahan yang dibeli tidak memiliki akses jalan dan status kepemilikan yang sah secara hukum. Lebih lanjut, proses pembayaran dilakukan melalui notaris yang tidak memiliki kewenangan di wilayah hukum tempat transaksi dilakukan. Dana pembelian tanah tersebut kemudian diketahui ditransfer ke rekening pribadi pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan diri sebagai penjual, namun tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Tindakan ini menyebabkan potensi kerugian negara dan mencerminkan adanya upaya manipulatif dalam pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan (Medistiara, 2022).

Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka dalam kasus ini dan menjerat mereka dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal perusahaan, serta lemahnya implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Manipulasi semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga mencederai kepercayaan publik

terhadap pengelolaan perusahaan BUMN, khususnya di sektor infrastruktur yang menjadi pilar utama pembangunan nasional (Medistiara, 2022)

Berdasarkan contoh kasus yang terjadi pada PT. Adhi Persada Realty (APR) tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih adanya kecurangan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dimana kecurangan-kecurangan ini dilakukan guna untuk mempercantik laporan keuangan ataupun menutupi kesalahan-kesalahan yang tidak ingin diketahui pihak pengguna informasi laporan keuangan. Dari fenomena yang diuraikan diatas, dapat dikatakan kualitas audit menjadi hal yang sangat perlu untuk ditingkatkan oleh auditor serta tetap selalu menjaga independensi yang dimiliki dalam menjalankan profesinya. Kualitas audit dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal, salah satunya adalah *Fee Audit*. *Fee Audit* adalah besarnya bayaran yang diberikan oleh klien kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) atas jasa yang diberikan yaitu berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan atau merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah *Fee Audit*. *Fee Audit* yakni suatu komisi berbentuk uang maupun barang yang dibagikan oleh klien atau pihak lain atas jasa audit yang telah diberikan untuk mendapatkan perikatan dari klien atau pihak lainnya (Siregar, 2020). Akuntan publik merupakan auditor eksternal yang bekerja memeriksa laporan keuangan perusahaan serta memperoleh imbalan sesuai kesepakatan dengan pihak perusahaan atas jasa yang telah diberikan. Tingkat besarnya *fee* yang diperoleh auditor menjadikannya ada dalam situasi yang dilematis, karena disatu sisi auditor diharuskan memiliki independen dalam memberi opini atas laporan keuangan perusahaan terkait kepentingan publik, namun disisi lain auditor dituntut memberikan jasa kepada klien atau pihak lain dengan maksimal supaya klien bisa merasakan puas atas jasa yang diberikan sehingga tetap memakai jasa nya lagi dilain hari (Salsabila M., 2018)

Berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2016 dalam Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP, faktor lain yang dapat menghasilkan

audit berkualitas adalah *Fee Audit*. Auditor yang berkualitas akan mengenakan fee yang tinggi, karena semakin tinggi *Fee Audit* yang diterima auditor maka akan membuat auditor melakukan prosedur audit yang lebih luas dan mendalam sehingga kualitas audit yang disajikan akan semakin tinggi. Semakin besar jasa audit yang diberikan oleh klien, dan indikasi hilangnya independensi auditor juga semakin tinggi. Besarnya *Fee Audit* yang didapatkan oleh 3 seorang auditor dapat mempengaruhi independensi seorang auditor. Auditor yang berkualitas tinggi akan mendapatkan *Fee Audit* yang tinggi pula, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan penelitian Fatah et al., (2022) *Fee Audit* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. *Fee Audit* yang tinggi menghasilkan kualitas audit yang baik pula, begitu sebaliknya. Kualitas audit yang baik tercipta karena kinerja auditor yang dibutuhkan lebih profesional dalam mengaudit laporan keuangan klien. Auditor yang bekerja profesional menganalisa biaya dari apa yang akan dikerjakannya, lama waktu pekerjaan, lokasi pekerjaan, tanggung jawab atas pekerjaan tersebut, dan lain sebagainya. Penelitian ini selaras dengan Sibuea & Arfianti, (2021), Fauziyyah & Praptiningsih, (2020) dan (Permatasari & Astuti, 2019). Sedangkan menurut penelitian Yustari et al., (2021) *Fee Audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Tinggi rendahnya *Fee Audit* yang dibayarkan kepada auditor oleh perusahaan tidak menentukan atau mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Meskipun *Fee Audit* yang dibayarkan oleh perusahaan kepada jasa auditor besar hal tersebut tidak menjamin kualitas dari audit yang dihasilkan oleh auditor terhadap laporan keuangan perusahaan klien, karena kualitas audit ditentukan dari kinerja dari auditor itu sendiri, selaras dengan penelitian Dewita & NR, (2023), Rahmadini & Fauzihardani, (2022) dan (Oktaviyani & Pangaribuan, 2021).

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diproksikan menerapkan log natural total asset dimiliki perusahaan sehingga perusahaan berkemampuan dalam menjaga dan meneruskan usahanya. Bertambah banyaknya aset yang perusahaan miliki, maka bertambah besarjuga kekuatan perusahaan dalam menjaga usahanya. “Perusahaan yang

tergolong besar juga mempunyai potensi yang baik dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan memberikan hasil laporan keuangan yang berkualitas baik (D. I. Lestari & Vadila, 2020).

Menurut penelitian Lestari & Vadila, (2020) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena Perusahaan berukuran besar karena kompleksitas operasi dan peningkatan pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sangat memerlukan KAP yang dapat mengurangi *agency cost*. Selain itu, jumlah konflik agensi yang meningkat menyebabkan permintaan untuk membedakan kualitas auditor juga meningkat. Oleh karena itu, perusahaan berukuran besar pastinya akan lebih memilih menggunakan jasa KAP berukuran besar untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, penelitian ini selaras dengan penelitian Yustari et al., (2021) sedangkan menurut Ardhyanto, (2020) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit karena perusahaan besar yang memilih KAP bereputasi cenderung memiliki risiko yang tinggi, sehingga cenderung dihindari oleh auditor serta menurut Hidayat, R. L., & Wahjoe, (2019) dan Effendi & Ulhaq, (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena kualitas audit tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, yang hanya menampilkan besar kecilnya total aset yang dikuasai oleh perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu adanya 4 variable yaitu *Fee Audit*, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan dan Risiko Perusahaan, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel yaitu *Fee Audit* dan Ukuran Perusahaan. Perbedaan selanjutnya terdapat di sampel, penelitian sebelumnya menggunakan sampel sektor manufaktur sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian penulis menggunakan sektor infrastruktur dan terdapat perbedaan pada rentang waktu. penelitian sebelumnya meneliti pada tahun 2017 sampai 2019 dan penulis menggunakan tahun 2021 sampai 2023. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan Eview sedangkan penelitian penulis menggunakan SPSS. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh *Fee Audit* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *fee audit* terhadap kuliatas audit pada perusahaan ?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *fee audit* terhadap kuliatas audit
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan pengaruh *fee audit* dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai

kualitas audit agar kualitas laporan keuangan perusahaan semakin baik. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana kinerja manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait audit.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan Perusahaan sektor infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 sampai 2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam mempelajari dan memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penelitian, definisi operasional, pengukuran variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan